

SINOPSIS

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Kedaulatan pangan merupakan wujud kemampuan Negara memproduksi pangan di dalam negeri secara bermartabat. Dibidang pertanian selain menjaga ketahanan pangan, pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 42,5%, dan tempat bergantung hidupnya 26 juta keluarga petani (130 juta jiwa) serta sebagai basis perekonomian perdesaan. Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini sebagai landasan pengembangan sistem ketahanan pangan di daerah. Seperti Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan berbagai program yang bermuara pada upaya pemantaban ketahanan pangan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 255/Kep.KDH/ A/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumusan masalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Yang Dirumuskan Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman?

Penelitian kali ini adalah suatu penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan realita yang terjadi. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman, dan masyarakat Kabupaten Sleman sebagai objek kebijakan. Data sendiri akan dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan (wawancara). Setelah semua data didapatkan, data tersebut nantinya akan diedit dahulu, kemudian baru diinterpretasikan untuk dianalisis.

Hasil dari penelitian, Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan masih mengalami kesulitan dalam membuat SPM, dan masih banyak program yang ada pada SPM belum terealisasi. Karena masih kekurangan jumlah sumber daya manusia, masih banyak kekurangan sumber daya keuangan. Kondisi keuangan yang masih minim mempengaruhi kinerja dan kondisi dari birokrasi secara kuantitas. Namun dengan kecenderungan dari pemerintah yang bersikap positif terhadap kebijakan, pemahaman hingga perfensi nilai para birokrat dengan melaksanakan kebijakan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah, kondisi sosial dan politiknya sangat mendukung keberadaan program ketahanan pangan dan SDA kesuburan tanah dan ketersediaan air, membantu terciptanya ketahanan pangan sangat baik di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis memiliki saran, Pemerintah Kabupaten Sleman harus segera membuat SPM daerah, menambah jumlah SDM, menambah sumber daya keuangan untuk ketahanan pangan bila memungkinkan